

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Kennedy *et al.* (2020), Pemerintah diharapkan mampu melaksanakan inisiatif pembangunan secara optimal sebagai pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam kemajuan suatu daerah. Kemajuan daerah dapat dinilai dari fungsi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan anggaran yang ada sekarang dapat ditangani untuk kepentingan masyarakat setempat, karena menghasilkan hasil berupa apa yang dibutuhkan di masa depan tentunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pemangku kepentingan di kotamadya secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelayanan, rencana, dan operasional untuk mengatasi tantangan di daerah ini. Hal ini terlihat dari proses penganggaran yang efektif dan efisien, sehingga penyerapan realisasi tetap terjaga.

2.1.2 Teori *Stewardship*

Donaldson *et al.* (1991), Teori ini mengemukakan terkait keadaan para petinggi suatu organisasi tidak memiliki semangat dalam menjalankan tugasnya seperti kepentingan individu melainkan fokus dengan tujuan. Teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Berdasarkan teori *stewardship*, prinsipal mengharapkan tanggung jawab bersama sesuai dengan kontribusi steward.

Hubungan teori ini dengan *sector public* adalah pihak steward sebagai pemerintah akan melakukan kewajibannya sesuai dengan keinginan *principal* lebih jelasnya yaitu keinginan masyarakat. Adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi yang diasumsikan oleh teori ini. keberhasilan suatu organisasi memberikan tingkat kepuasan yang maksimal kepada pihak masyarakat. Hal ini juga membuat rakyat akan menilai kinerja yang dilakukan oleh pemerintah

sudah baik, tujuannya adalah meninjau tingkat serapan anggaran pada masing-masing pemerintah daerah dapat tercapai secara optimal (Oktaliza *et al.*, 2020).

2.1.3 Anggaran dan Penganggaran

Soleiman *et al.* (2020), anggaran merupakan salah satu alat yang sangat wajib untuk menjadi pusat perhatian pada suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Anggaran termasuk sarana utama untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dalam setiap perusahaan. Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapai, sedangkan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Anggaran merupakan alat penting yang akan dijadikan penentuan dalam pengambilan keputusan dan dalam perihal mengatur kegiatan divisi dalam suatu organisasi. Proses penganggaran melibatkan kepala bagian untuk memberikan masukan atas kebutuhan unitnya sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan (Andriati, 2019). Eksekusi anggaran adalah upaya pemerintah untuk mencapai anggaran perencanaan yang dimaksudkan, Putri *et al.* (2020) , menyebutkan eksekusi anggaran juga merupakan salah satu fase yang terlibat dalam penggunaan anggaran.

Menurut Sujarweni (2021: 32), Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua yaitu anggaran operasional dan anggaran modal dimana anggaran akan digunakan untuk melakukan perencanaan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan organisasi sektor publik. Belanja operasional merupakan tidak untuk menambah aktiva organisasi dan masa manfaatnya hanya satu periode. Anggaran modal menunjukkan rencana memberlanjkan aktiva tetap yang sifatnya jangka panjang dan digunakan untuk kegiatan organisasi seperti gedung, peralatan, kendaraan dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun.

2.1.4 Belanja Pemerintah

Huda *et al.* (2020) menyebutkan bahwa Pengeluaran pemerintah menggambarkan keadaan kebijakan pemerintah, dan jika ada kebijakan untuk mengirimkan barang atau jasa, pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran untuk menerapkan kebijakan tersebut. Teori Peacock dan Wiseman menjelaskan

mengapa pemerintah selalu mendorong untuk memperbesar pengeluaran, sementara masyarakat ragu-ragu untuk membayar pajak yang lebih tinggi untuk menutupi kebutuhan mereka.

2.1.5 Perbendaharaan Negara

Sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien, fungsi perbendaharaan semakin penting. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan *idle cash* untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan (Anas Nur Huda dan Pandaya, 2020)

2.1.6 Konsep Anggaran Sektor Publik

Abdul Halim (2017: 92), menyebutkan bahwa anggaran sektor publik adalah rencana kerja yang disusun dan diterapkan oleh pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang didalamnya terdapat informasi terdapat pendapatan, pengeluaran, kegiatan, dan pembiayaan dalam satuan moneter dan dinyatakan dalam ukuran keuangan.

Arisia Dewi (2022) anggaran merupakan pernyataan etimasi kinerja yang hendak dicapai selama satu periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran keuangan.

Penganggaran adalah tugas penting yang harus diselesaikan agar organisasi dapat memenuhi tujuannya. Dalam setiap organisasi, baik swasta maupun publik, anggaran merupakan alat utama untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.

2.1.7 Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran ada beberapa alasan penyebab anggaran dianggap penting Mardiasmo dalam (Abdul Halim, 2017: 93) yaitu :

- a. Anggaran adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mempromosikan pembangunan sosial ekonomi, menjanjikan keberlanjutan, dan meningkatkan standar hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan untuk keinginan dan keinginan masyarakat yang tidak berkesudahan terus berkembang, meskipun dengan sumber daya yang terbatas.
- c. Anggaran diperlukan agar pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Menurut Sujarweni (2021: 29), anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai:

1. Alat Perencanaan
Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan; Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan; Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun; Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.
2. Alat Pengendalian
Anggaran sebagai alat pengendali manajerial, anggaran ini berfungsi untuk meyakinkan organisasi sektor publik bahwa organisasi mempunyai sumber dana untuk membiayai rencana program-program organisasi.
3. Alat Kebijakan Fiskal
Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan organisasi sektor publik, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.
4. Alat Politik
Anggaran dapat digunakan sebagai alat politik yaitu bentuk dokumen politik yang dapat dijadikan komitmen kesepakatan eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
5. Alat Koordinasi dan Komunikasi
Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan organisasi.
6. Alat Penilaian Kinerja
Kinerja manajemen dan pimpinan akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.

7. Alat Motivasi
Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi bagi pimpinan dan karyawan dalam bekerja secara efektif dan efisien.
8. Alat Menciptakan Ruang Publik
Anggaran publik dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, dimana keberadaan anggaran tidak boleh diabaikan oleh berbagai organisasi sektor publik seperti kabinet, birokrat dan DPR/MPR, maupun masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya.

2.1.8 Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran sangat penting untuk mencapai tujuan nasional, seperti menumbuhkan dan menjaga kesejahteraan rakyat. "Tujuan anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi, mempunyai peran dalam mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta pemerataan pendapatan dalam jangka memenuhi tujuan negara," (UU No 17 Tahun 2003) tentang Keuangan Negara.

Abdul Halim (2017:93) menyebutkan bahwa menurut Bank Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia memiliki kondisi penyerapan anggaran yang hampir sama, yakni lambat di awal tahun tetapi menumpuk di akhir tahun (tertunda belanja dan tunda pembayaran). pengeluaran tidak berulang, seperti biaya konstruksi dan biaya dukungan sosial, biasanya timbul pada akhir tahun. Masalah lain adalah pengeluaran yang lebih kecil dari anggaran.

Muhammad Syahwildan (2022), penyerapan anggaran merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah pada saat bertugas di setiap kegiatan terlihat dari akumulasi dari penyerapan anggaran yang telah dilakukan oleh OPD, Rendahnya penyerapan anggaran di pemerintah pusat dan daerah sering diperbincangkan oleh para pakar ekonomi sebagai salah satu indikator belum optimalnya kinerja pemerintah yang telah ditargetkan, artinya target penyerapan anggaran tidak hanya menghabiskan anggaran tetapi juga bagaimana anggaran dapat dibelanjakan dan dioptimalkan setiap tahun.

Anggaran juga menjadi dasar penetapan tujuan dan sebenarnya dapat dipantau dan digunakan untuk mengukur kinerja suatu lembaga. Dari pengertian anggaran, tindak lanjut anggaran terdiri dari realisasi anggaran yang dialokasikan sesuai dengan ketentuan anggaran kelembagaan. Dalam hal ini yang dimaksud

dengan pemantauan adalah realisasi kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan dalam satu tahun pajak. Dengan demikian realisasi kegiatan yang direncanakan mencerminkan penyerapan anggaran. (Andriati, 2019)

Dari penelitian ini Penyerapan Anggaran diukur menggunakan kuisisioner yang diadopsi dari penelitian Periansya (2016) dan BPBK (2017) disesuaikan berdasarkan (Permenkeu 258/PMK 02/2021, n.d.) dengan dimensi realisasi anggaran dan konsistensi pelaksanaan program.

2.1.9 Perencanaan Anggaran

Delia *et al.* (2021) menyebutkan bahwa pentingnya perencanaan dalam organisasi tidak dapat dilebih-lebihkan. Anggaran diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut. Anggaran adalah alat politik di sektor publik, yang berfungsi setugai bentuk komitmen eksekutif dan konsensus partemen tentang penggunaan uang publik untuk tujuan tertentu. Perencanaan anggaran adalah proses pencapaian tujuan, menentukan strategi untuk memenuhi target tersebut, dan mengembangkan serangkaian rencana komprehensif untuk menggabungkan dan mengoordinasikan berbagai operasi tulis (Suyono, 2020)

Perencanaan sangat erat kaitannya dengan daya serap anggaran karena perencanaan anggaran yang tidak berhasil akan berdampak pada inefisiensi program kerja pemerintah, yang secara tidak langsung akan berdampak negatif terhadap kinerja pemerintah dokumen perencanaan pembangunan. Rencana pembangunan nasional ini dirancang untuk memastikan keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan. Setiap rencana kerja menjadi dasar untuk mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan rencana selanjutnya. Oleh karena itu, apabila pada saat pelaksanaan rencana tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, perencanaan anggaran gagal dan berdampak pada inefisiensi program kerja pemerintah, hal ini secara tidak langsung akan berdampak negatif terhadap hasil operasional (Tofani, 2020)

Perencanaan anggaran dilihat dengan dimensi akurasi data, perencanaan awal dan kebutuhan pengesahan APBD yang diukur menggunakan kuisisioner yang diadopsi dari penelitian Hendris Heryanto (2012); Monik Zarinah , Darwanis dan

Syukiry Abdullah (2016); Ni Luh Putu Lestari Dewi, A.A.N.B. Dwiandra dan Made Gede Wirakusuma (2017).

2.1.10 Kualitas Aparatur Pemerintah

Keterampilan individu memberi orang keunggulan kompetitif di tempat kerja. Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dapat ditunjukkan dengan tingkat pendidikan yang sesuai dengan hidangnya, serta mendapatkan pelatihan teknis secara berkala dari tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi/instansi dengan pekerja yang berkualitas dan berorientasi padu implementasi dapat mencapai tingkat penyerapan anggaran yang tinggi (Muhammad Syahwildan, 2022).

Penelitian lainnya Delia *et al.* (2021) juga mengungkapkan bahwa “kualitas sumber daya manusia berpengaruh cukup besar terhadap penyerapan anggaran dalam melakukan pekerjaan”

Pemerintah sebagai unit organisasi dalam mengelola organisasinya secara efektif dan efisien memerlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugasnya. Ini berhubungan dengan SDM yang berkualitas dapat mendukung pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah (Oktari *et al.*, 2021).

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di tingkat satker, terutama sumber daya manusia pengelola keuangan, sumber daya manusia pada proses anggaran erat kaitannya dengan kapasitas dan kemampuan individu untuk menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan keuangan instansi pemerintah (Tofani *et al.*, 2020).

Adapun yang termasuk dalam kualitas aparatur Pemerintah dimana hal ini yakni aparatur pemerintah bagian keuangan dan anggaran adalah PPK, KPA, PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara pengeluaran.

PERPRES 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Adapun tupoksi aparatur pemerintah diatas adalah :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Berperan sebagai Kepala Satuan Kerja K/L atau Kepala Unit SKPD, berwenang atas pengelolaan keuangan, dan menjadi pelaku pengadaan Dalam fungsi manajerial, dapat menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi Dalam melakukan fungsi delegasi dan mandat sesuai peraturan yang mengatur Untuk di daerah, memiliki tugas dan kewenangan merangkap sebagai PPK.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Menjadi bagian dari pengelola keuangan K/L Dalam pengangkatan, harus memenuhi persyaratan pengangkatan sebagai PPK Dapat diaman oleh PA/KPA dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hadir dari awal sampai dengan akhir proses pengadaan (sejak perencanaan s.d serah terima).
- c. Pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) adalah Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD, Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah menyebutkan bahwa tupoksi pejabat penatausahaan keuangan adalah melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, melaksanakan fungsi akuntansi pada OPD dan menyusun laporan keuangan OPD.

Adapun tupoksi Bendahara Pengeluaran adalah mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS, menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU, melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya, menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik, dan lainnya.

Kualitas aparatur dilihat dengan dimensi pengalaman, kompetensi, Pendidikan dan pelatihan yang diukur menggunakan kuisioner yang diadopsi dari penelitian Dwiyana (2017).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Kennedy <i>et al.</i> , 2020	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	X1:perencanaan anggaran X2: SDM X3:Komitmen organisasi X4:Pencatatan Administrasi	Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Pencatatan Administrasi,

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			X5: SPIP Y: Penyerapan Anggaran	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2.	Oktaliza <i>et al.</i> , 2020	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau	X1: Kualitas Sumber Daya Manusia X2 : Regulasi X3 : Perencanaan Anggaran X4 : Komitmen Manajemen Y : Penyerapan Anggaran Belanja	Kualitas SDM, Regulasi, Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Komitmen Manajemen berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja.
3.	Suyono, 2020	Antecedent Variable Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	X1:Perencanaan Anggaran X2:Pelaksanaan Anggaran X3:Pengadaan Barang dan Jasa X4: Komitmen Manajemen X5: Lingkungan Birokrasi	Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Komitmen Manajemen Lingkungan Birokrasi

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		Pemerintah Kabupaten Wonosobo)	X6: Kompetensi Sumber Daya Manusia Y : Penyerapan APBD	Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Penyerapan APBD
4	(Dheya Rahmani <i>et al.</i> , 2021)	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran belanja daerah.	X1 : Kompetensi Sumber daya manusia X2 : Perencanaan dan Pelaksana Anggaran X3 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Kompetensi SDM Perencanaan Anggaran Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap keterlambatan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
				Penyerapan Anggaran.
5	(Huda & Pandaya, 2020)	Determinan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga	X1: Perencanaan anggaran X2 :Administrasi perbendaharaan X3 : Dokumen pelaksanaan anggaran X4 : Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Y : Penyerapan Anggaran	Perencanaan Anggaran, Administrasi Perbendaharaan ,Dokumen Pelaksanaan Anggaran ,PBJ berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran.
6	Syafira Rizka Nurwidya, Vina Citra Mulyandani (2020)	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyerapan Anggaran (Studi Kasus Pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Kementerian PUPR)	X1 : Perencanaan Anggaran X2 : Pelaksanaan Anggaran X3 : Pengadaan Barang/Jasa Dalam X4 : Sumber Daya Manusia X5 : Partisipasi Masyarakat	Perencanaan, Pelaksanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
7	(Delia <i>et al.</i> ,2021)	Analisis Determinasi penyerapan anggaran dengan Perencanaan Anggaran dan Politik Anggaran Sebagai Pemoderasi	X1 = Kompetensi SDM X2 = Pengadaan barang dan jasa X3= Komitmen organisasi X4 = Perencanaan anggaran X5 = Politik anggaran Y : Penyerapan anggaran	Kompetensi sumber daya manusia, Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Perencanaan anggaran dapat memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan Anggaran. Politik anggaran dapat memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
8	(Muhammad Syahwildan, 2022)	Analisis Faktor yang mempengaruhi Penyerapan anggaran di pemerintah daerah kabupaten bekasi	X1: Perencanaan Anggaran X2: pelaksanaan anggaran X3: Pencatatan Administrasi X4: Kompetensi Sumber Daya Manusia Y : Tingkat Penyerapan Anggaran	Perencanaan anggaran, Pelaksanaan anggaran dan Pencatatan Adiministrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.
9	(Soleiman <i>et al.</i> ,2021)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayan IV Provinsi NTT	X1 : Dokumen perencanaan X2 : Pencatatan Administrasi X3 : Kompetensi SDM X4 : Dokumen pengadaan Y : Penyerapan anggaran	Dokumen Perencanaan, Pencatatan Administrasi, berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Kompetensi sumber dan daya manusia secara persial tidak berpengaruh

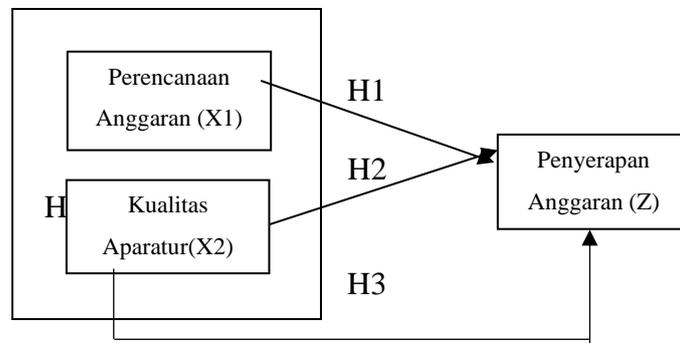
No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
				terhadap Penyerapan Anggaran. Perencanaan, Pencatatan Administrasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Dokumen Pengadaan Secara simultan (bersamaan) berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.
10	Tofany <i>et al.</i> , 2020)	Analisis faktor -faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada unit kerja mahkamah agung di wilayah riau dan kepri dengan komitmen Organisasi sebagai faktor moderasi	X1 : Beban Kerja, X2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 : Perencanaan, Administrasi, X4 :Sumber Daya Manusia, X5 :Pengadaan Barang Dan Jasa	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Perencanaan, Administrasi ,Pengadaan Barang dan Jasa , dan Komitmen berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran. Beban kerja

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			Y :Penyerapan Anggaran Z1 :Komitmen Organisasi	tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran 3. Komitmen pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran
11	Fatiyah <i>et al.</i> (2021)	Hambatan penyerapan anggaran Pada balai besar veteriner wates	X1 : Tahapan Penyiapan Anggaran X2 : Tahapan Perencanaan X3 : Tahapan Monitoring dan Ealuasi Y : Penyerapan Anggaran	Tahapan Penyiapan Anggaran, Tahapan Perencanaan, Tahapan Monitoring berpengaruh pada penyerapan anggaran
12	Ulandari <i>et al.</i> , 2021	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Administrasi Sebagai Pemoderasi	X1 : Perencanaan Anggaran X2 : SDM X3 : PBJ X4 : Administrasi Y : Penyerapan Anggaran	Perencanaan, Sumber. daya manusia, Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran, Administrasi

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
				tidak berpengaruh terhadap hubungan perencanaan dengan penyerapan anggaran, Administrasi tidak berpengaruh terhadap hubungan Sumber Daya Manusia dengan Penyerapan Anggaran dan Administrasi tidak berpengaruh terhadap hubungan Pengadaan Barang/Jasa dengan penyerapan anggaran

Sumber : data diolah 2022

2.3 Kerangka Penelitian



Sumber : data diolah 2022

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Keterangan :

1. Pengaruh X1 terhadap Y
2. Pengaruh X2 terhadap Y
3. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y

Dimana :

X1 : Perencanaan Anggaran

X2 : Kualitas Aparatur

Y : Penyerapan Anggaran

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Variabel independen perencanaan anggaran,, berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran sesuai dengan kerangka konseptual di atas. Kennedy *et al.* (2020) mendukung hal tersebut, menyatakan bahwa “Perencanaan anggaran berpengaruh cukup signifikan terhadap penyerapan anggaran dimana semakin baik dan tepat sasaran perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, maka semakin tinggi derajat penyerapan anggaran”

Perencanaan anggaran merupakan proses penyusunan rencana kegiatan anggaran yang tepat untuk jangka waktu tertentu (Yuliani, 2020). Perencanaan program kerja dan kegiatan menjadi satu kesatuan dengan perencanaan anggaran, sehingga program kerja dan kegiatan direncanakan sesuai dengan kemampuan

anggaran yang telah tersedia (Zulaikah dan Burhany, 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik perencanaan anggaran maka semakin baik pula tingkat penyerapan anggaran. Hipotesis pertama dalam penelitian ini didasarkan pada deskripsi ini:

H1: Diduga Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

2.4.2 Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Penyerapan Anggaran

Variabel independen kualitas Aparatur pemerintah, berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran sesuai dengan kerangka konseptual di atas. Oktaliza *et al.* (2020) mengungkapkan bahwa “Aparatur Pemerintah yang tidak memiliki sertifikasi yang memadai, yang tidak pernah mengikuti pelatihan, dan bahkan sering terjadi memiliki tugas ganda menyebabkan proses penyerapan anggaran menjadi buruk”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas aparatur pemerintah maka semakin baik pula tingkat penyerapan anggaran. Hipotesis kedua dalam penelitian ini didasarkan pada deskripsi ini:

H2: Diduga kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

2.4.3 Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Aparatur Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan penjabaran hipotesis diatas, perencanaan anggaran yang baik dan disusun dengan matang sesuai dengan program kegiatan organisasi yang akan dilaksanakan, dan sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang berkompeten sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan di tempatkan pada bidang yang sesuai maka penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan. Selain itu, apabila seorang aparatur memahami pekerjaan yang telah diberikan terutama dalam hal menyusun anggaran sampai dengan pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran benar-benar terserap dan menghasilkan *output* yang dapat dirasakan oleh

masyarakat maka akan mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Diduga perencanaan anggaran dan kualitas aparatur berpengaruh terhadap penyerapan anggaran